

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA

Oleh
Nugraha Kamarullah
Nim. 2205010114

ABSTRAK

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan beberapa pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian dan pemajuan objek kebudayaan Tudung Manto sebagai warisan budaya tak benda khas Lingga yang memiliki nilai sakral sekaligus potensi ekonomi kreatif berjalan sejak 2021. masalah dalam kolaborasi ini terletak pada belum adanya aturan teknis yang mengatur secara khusus tentang pelestarian tudung manto dan risiko kepunahan pengrajin pada 2021. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Collaborative Governance dari Ansell & Gash (2008) yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara, serta empat pilar pemajuan kebudayaan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dekranasda, Lembaga Adat Melayu (LAM), serta para pengrajin Tudung Manto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. kondisi kolaborasi ini dipicu oleh keadaan darurat di mana Tudung Manto pengrajinnya hampir punah pada tahun 2021 dan Karena ketidakseimbangan sumber daya, ada ketergantungan antar-aktor dalam situasi ini. kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini dilaksanakan melalui model yang mengutamakan berbagi peran. melalui diskusi tatap muka. Desain Institusional dalam proses kolaborasi tidak memiliki regulasi teknis dan hanya mengandalkan pertemuan tatap muka sebagai wadah koordinasi. Komitmen dalam pelestarian tudung manto bisa ditemukan dengan pengadaan unit Tudung Manto oleh Dinas Kebudayaan untuk dipinjamkan kepada masyarakat dan pelatihan tenaga kerja mandiri yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan secara teratur sejak tahun 2022. Pemahaman bersama tentang Tudung Manto dipahami semua pihak sebagai salah satu simbol identitas Bunda Tanah Melayu yang bisa diberdayakan untuk meningkatkan penghasilan pengrajin. Hasil sementara dari kerjasama ini mencakup empat pilar pemajuan kebudayaan: perlindungan dengan adanya sertifikat WBTB dan HKI 2021, pengembangan dengan mendapatkan rekor MURI 1000 tudung manto tahun 2023, pemanfaatan dengan penjualan tudung manto tingkat lokal nasional hingga internasional, serta pembinaan melalui regenerasi pengrajin yang berkelanjutan tahun 2022 sampai 2024.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Tudung Manto, Pemajuan Kebudayaan, Kabupaten Lingga.

COLLABORATION OF LOCAL GOVERNMENT IN THE PROMOTION OF THE CULTURAL OBJECT TUDUNG MANTO IN LINGGA REGENCY

Nugraha Kamarullah
Nim. 2205010114

ABSTRACT

The collaboration between the Lingga Regency Government and several stakeholders in the effort to preserve and promote the Tudung Manto cultural object as an intangible cultural heritage unique to Lingga, which has both sacred value and creative economic potential, has been ongoing since 2021. The problem in this collaboration lies in the absence of technical regulations specifically governing the preservation of Tudung Manto and the risk of artisan extinction in 2021. The theoretical framework used in this research is the Collaborative Governance model by Ansell & Gash (2008), which includes face-to-face dialog, building trust, commitment to the process, shared understanding, and interim results, as well as the four pillars of cultural advancement based on Law No. 5 of 2017. The research method used is a descriptive qualitative approach. Data were collected thru observation and in-depth interviews with key informants from the Cultural Office, the Manpower and Transmigration Office, Dekranasda, the Malay Customary Institution (LAM), and the Tudung Manto craftsmen. The research results show that the collaboration did not go well. the condition of this collaboration was triggered by an emergency where the Tudung Manto artisans were nearly extinct in 2021, and due to the imbalance of resources, there is inter-actor dependency in this situation. Facilitative leadership in this collaboration is implemented thru a model that prioritizes role-sharing thru face-to-face discussions. The Institutional Design in the collaboration process lacks technical regulations and relies solely on face-to-face meetings as a coordination platform. The commitment to the preservation of the manto hood can be found in the procurement of manto hood units by the Cultural Office to be loaned to the community and the independent workforce training conducted by the Manpower Office regularly since 2022. The shared understanding of Tudung Manto is recognized by all parties as one of the symbols of the identity of Bunda Tanah Melayu that can be empowered to increase the income of craftsmen. The preliminary results of this collaboration encompass four pillars of cultural advancement: protection with the issuance of WBTB and HKI certificates in 2021, development with the achievement of the MURI record for 1000 Tudung Manto in 2023, utilization thru the sale of Tudung Manto at local, national, and international levels, and fostering thru the sustainable regeneration of craftsmen from 2022 to 2024.

Keywords: Collaborative Governance, Tudung Manto, Cultural Advancement, Lingga Regency.